

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (R K P D)

Kabupaten Balangan

Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG)
TAHUN ANGGARAN 2021



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2022 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang bersifat teknis operasional dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta mengakomodir aspirasi, usulan masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022
BUPATI BALANGAN
NOMOR 34 TAHUN 2021

f

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2022 dapat diubah dalam hal terjadi:
 - a. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
 - b. penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
 - c. terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Renstra SKPD, Renja SKPD dan Perubahan APBD Tahun 2022.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.



Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 1 Juli 2021
BUPATI BALANGAN,
A2

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 1 Juli 2021
PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. YULIANSYAH

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPIMD	Realisasi Capaian RKPDTahun	Prakiraan Capaian Target RKPDTahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif			
2	22	4	2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Kab/Kota	6 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	359.845.000					2 Kegiatan	187.300.000		
2	22	4	2.01	3 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah			100 orang	359.845.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	Masyarakat balangan	100 orang	187.300.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	5		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Percentasi Cagar Budaya Terlestari dan Terkelola Dengan Baik	100 %		0 %	66,7 %	322.870.000					66,7 %	354.750.000		
2	22	5	2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	persentase cagar budaya	persen		persen	66,7 persen	322.870.000					66,7 persen	354.750.000		
2	22	5	2.02	1 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dilindungi			10 buah	276.000.000	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	objek cagar budaya	10 buah	267.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	22	5	2.02	3 Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dimanfaatkan			2 buah	46.870.000	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	objek cagar budaya	2 buah	87.750.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												50.000.000.000	40.000.000.000	
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	78,20 (BB) Nilai		68,40 (B) Nilai	70,40 (BB) Nilai	50.000.000.000					70,40 (BB) Nilai	40.000.000.000		
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %		90 %	90 %	50.000.000.000					90 %	40.000.000.000		
1	2	1	2.10	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Terlaksananya Penerapan BLUD Pada Rumah Sakit			100 Persen	50.000.000.000	Kab. Balangan, Paringin, Paringin Timur	Pendapatan dari BLUD		2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	Pengelolaan BLUD	100 Persen	40.000.000.000	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												735.785.950	772.575.248	
1	2	2		PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	11		15	15	735.785.950					15			
1	2	2			Angka Kematian Ibu (AKI) per 100,000 Kelahiran Hidup	130		221	177						177			
1	2	2			Prevalensi Stunting	14 %		22 %	18,4 %						18,4 %			
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Usia Harapan Hidup (UHH)	68,92 tahun		67,92 tahun	68,12 tahun						68,12 tahun			
1	2	2	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Perseentase Capaian SPM bidang Kesehatan	100 %		100 %	100 %	735.785.950					100 %	772.575.248		
1	2	2	2.02		Persentase Penyelenggaraan operasional Pelayanan Puskesmas			100 %	735.785.950	Kab. Balangan, Paringin, Paringin Timur	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	Masyarakat	100 %	772.575.248	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												724.671.600	760.905.180	
1	2	2		PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	11		15	15	724.671.600					15			
1	2	2			Angka Kematian Ibu (AKI) per 100,000 Kelahiran Hidup	130		221	177						177			
1	2	2			Prevalensi Stunting	14 %		22 %	18,4 %						18,4 %			
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Usia Harapan Hidup (UHH)	68,92 tahun		67,92 tahun	68,12 tahun						68,12 tahun			
1	2	2	2.02	33 Operasional Pelayanan Puskesmas	Perseentase Capaian SPM bidang Kesehatan	100 %		100 %	100 %	724.671.600					100 %	760.905.180		
1	2	2	2.02		Persentase Penyelenggaraan operasional Pelayanan Puskesmas			100 %	724.671.600	Kab. Balangan, Paringin, Batu Piring	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	Masyarakat	100 %	760.905.180	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												739.365.058	776.333.311	